



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FERDY TRISANTO KURNIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PERENCANAAN**
3. NHK : **413520**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	24.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 237 m2/290 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.350.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.200.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 471 m2/495 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 5.800.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/410 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.150.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/390 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 3.000.000.000		
7. Tanah Seluas 322 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 5.300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	180.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.175.710.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	25.855.710.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	25.855.710.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.